

## KEBIJAKAN EKONOMI CINA PADA KEBIJAKAN ALIBABA

Syaiful M<sup>1</sup>, Henry Susanto<sup>2</sup>, Marzius Insani<sup>3</sup>, Asna Ariz Kawanti<sup>4</sup>  
Universitas Lampung<sup>1,2,3,4</sup>  
syaiful.m@fkip.unila.ac.id<sup>1</sup>

### ABSTRAK

Tujuan penelitian untuk menganalisis persamaan antara kebijakan ekonomi Alibaba pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 dan kebijakan Rencana 5 Tahun Pertama Cina. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian historis. Hasil penelitian menunjukkan terdapat persamaan antara kebijakan ekonomi Alibaba dan kebijakan ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina. Persamaan yang diteliti yaitu pada ekonomi sektor pertanian dan industri menengah. Dibidang pertanian Cina membuat pertanian yang lebih modern untuk kemajuan sistem pertanian negaranya, hal ini juga dilakukan pada kabinet Alibaba yaitu dengan modernisasi sistem pertanian di Indonesia. Dibidang industri perusahaan di Cina diberikan pinjaman kredit lisensi untuk menasionalisasikan perindustrian di negara Cina. Selain itu pengadaan pajak dan sistem pemerintahan yang bersentral ke pusat mempermudah pemerintah dalam mengatur proses nasionalisasi perekonomian di Cina. Simpulan penelitian bahwa kebijakan di Indonesia dan Cina memiliki banyak kesamaan diantaranya kesamaan pada cita-cita yaitu menghapus penindasan dan mewujudkan keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Alibaba, Cina, Ekonomi, Kebijakan

### ABSTRACT

*The purpose of this study is to analyze the similarities between Alibaba's economic policies during the Ali Sastroamidjojo 1 Cabinet and the policies of China's First 5-Year Plan. The research method used is historical research. The results show that there are similarities between Alibaba's economic policies and China's First 5-Year Plan economic policies. The equation studied is in the economy of the agricultural sector and medium industry. In the field of agriculture, China is making more modern agriculture for the advancement of its country's agricultural system, this is also done in Alibaba's cabinet, namely by modernizing the agricultural system in Indonesia. In the industrial sector, companies in China are granted credit licenses to nationalize industry in China. In addition, the procurement of taxes and a government system that is centralized to the center makes it easier for the government to regulate the process of nationalizing the economy in China. The conclusion of the study is that the policies in Indonesia and China have many similarities, including the similarity in the ideals of eliminating oppression and realizing social justice.*

**Keywords:** Alibaba, China, Economy, Policy

## PENDAHULUAN

Indonesia memasuki masa demokrasi Liberal mulai dari pengakuan kedaulatan Indonesia. Masa demokrasi Liberal berlaku antara tahun 1949-1959, ditandai dengan tumbuh suburnya partai politik dan berlakunya kabinet parlementer. Demokrasi Liberal di Indonesia ditandai oleh prestasi politik dan kemelut politik. Prestasi politik berupa pemberlakuan sistem multipartai dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kemelut politik berupa kabinet yang silih berganti dan perdebatan berkepanjangan dalam konstituante (Setiawan, 2018).

Indonesia telah kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada tanggal 1 Agustus 1950, langsung dihadapkan oleh beberapa masalah penting, termasuk masalah ekonomi. Jatuhnya nilai rupiah dan merosotnya kegiatan ekspor telah meningkatkan laju inflasi dan krisis devisa yang terus berlanjut, bahkan semakin memuncak pada tahun 1954. Sementara itu, pengeluaran pemerintah untuk kegiatan non pembangunan cukup besar (Indonesia, 2005).

Pada Anggaran belanja tahun 1949, beberapa corak yang khusus bagi anggaran kolonial atau setengah kolonial tampak jelas dengan jelas pada anggaran tahun 1950-1951, yaitu: Sebagian besar dari pendapatan negara diperoleh dari hasil pemungutan pajak-pajak. Sebagian besar dari pendapatan ini dipergunakan untuk keperluan administrasi Pemerintah Sipil, untuk keperluan ketentaraan, kepolisian, penjara, dan pengadilan. Sebagian dari pendapatan negara dipakai untuk membayar pinjaman dari luar negeri beserta dengan bunganya. Hanya sebagian yang sangat kecil saja dari

pendapatan negara digunakan untuk memenuhi kebutuhan materiil dan kulturil dari Rakyat kita. Tempat-tempat yang penting dalam lapangan keuangan dikuasai sepenuhnya oleh perusahaan-perusahaan dan bank-bank modal asing

Adanya defisit atau kekurangan anggaran belanja yang menimbulkan tekanan-tekanan inflasi yang luar biasa dan Tekanan-tekanan deflasi sebagai akibat dari pada politik masa ontslag semakin meluaskan pengangguran dan kemiskinan (Sakirman, 1954).

Posisi devisa mulai memburuk sejak pertengahan tahun 1951 yaitu pada masa kabinet Wilopo. Posisi tersebut terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada bulan April-Mei 1954. Untuk memperbaiki posisi cadangan devisa, pemerintah menempuh beberapa kebijakan yang terfokus pada penggalakan kegiatan ekspor dengan memberikan kemudahan kepada beberapa eksportir. Pemerintah juga melakukan pembatasan impor secara kuantitatif pada pertengahan tahun 1954 dan tahun-tahun berikutnya. Pembatasan impor ini dilaksanakan, antara lain, dengan cara mempertinggi pungutan-pungutan tambahan atas impor (Indonesia, 2005).

Proses nasionalisme dari DJB mungkin menjadi satu hal yang ditunggu pada tahun ini, mengingat Indonesia harus segera mengatur sistem moneter negaranya, terutama peredaran uang yang bisa saja menyebabkan inflasi. Peran penting dari bank sirkulasi sangatlah vital untuk kelangsungan perekonomian negara. Pemerintah memiliki tanggungan menasionalisasikan De Javasche Bank dan kemungkinan nasionalisasi ini terjadi pada April 1952.

Pada tanggal 15 Desember 1951 dikeluarkan Undang-Undang No. 24 tahun 1951 tentang Nasionalisasi *De Javasche Bank*. Ini adalah salah satu hal yang ditunggu karena keluarnya undang-undang ini merupakan titik yang pasti mengenai Nasionalisasi *De Javasche Bank*. Namun, muncul juga himbauan untuk melakukan nasionalisasi DJB secara hati-hati agar tidak menimbulkan pertentangan lagi dengan pihak Belanda. Pada akhir tahun 1952, muncul pernyataan nama *De Javasche Bank* akan berganti menjadi Bank Indonesia.

Latar belakang munculnya pernyataan ini mungkin berdasarkan pada UUD 1945 yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menyebutkan bahwa ada bank bernama Bank Indonesia yang akan menjadi badan pengatur peredaran uang di Indonesia. Dilihat dari fungsinya saja, DJB sebagai bank sirkulasi sama fungsinya dengan 'Bank Indonesia' yang disebutkan dalam UUD 1945 (Hidayat, 2020).

Walaupun telah mengalami proses Nasionalisasi jajaran staff yang ada dalam kepengurusan *De Javasche Bank* masih dipenuhi oleh orang Belanda, walaupun Presiden utama sudah digantikan orang Indonesia yaitu Syafruddin Prawiranegara. Wakil Direktur masih dijabat oleh orang Belanda. Penasihat, Dewan Komisaris, dan Direktur Muda pun masih diwarnai nama orang Belanda dalam jajarannya. Begitu pula kantor cabang di Indonesia yang semua direktornya masih orang Belanda. Hal ini mungkin disebabkan karena belum selesainya proses nasionalisasi yang masih dalam tahap penyusunan RUU. Kurangnya tenaga kerja yang berpengalaman dalam bidang perekonomian juga bisa menjadi

faktor penyebab kurangnya tenaga kerja Indonesia dalam jajaran kepengurusan DJB (Sudirman, 2014).

Dua bulan setelah mundurnya Kabinet Wilopo terbentuk kabinet baru yaitu Kabinet Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953 - 12 Agustus 1955). Kabinet Ali mendapat dukungan dari PNI dan NU, sedangkan Masyumi memilih sebagai oposisi. Kabinet Ali mempunyai program 4 pasal yaitu Program dalam negeri antara lain meningkatkan keamanan dan kemakmuran dan segera diselenggarakan pemilihan umum. Pembebasan Irian Barat secepatnya. Program luar negeri antara lain pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali Persetujuan KMB. Dan penyelesaian pertikaian politik (Hatta, 2008).

Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 adalah kabinet ke 4 setelah kabinet Wilopo, Ali berusaha menanggulangi kekacauan ekonomi yang terjadi di Indonesia dengan menempuh kebijakan ekonomi *Ali Baba*.

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh menteri perekonomian kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yaitu Iskaq Tjokrohadisurjo. Menurut Iskaq dalam rangka memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerja sama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Sistem ekonomi Alibaba merupakan penggalangan kerja sama antara pengusaha Cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non pribumi diwajibkan memberikan pelatihan kepada pengusaha pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi pengusaha swasta nasional (Nalenan, 1982).

Kedekatan hubungan antara Indonesia dan Cina juga mulai terjalin baik pada masa Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 tahun 1953-1955 hal

ini terbukti dengan pengiriman duta besar pertama Peking ke Jakarta yaitu Wang Renshu dan pengiriman seorang elite Indonesia ke Peking yaitu Arnold Mononutu. Kebijakan Rencana 5 tahun pertama di Cina memperoleh keberhasilan karena mampu menasionalisasikan kembali perekonomian di negara tersebut. Hal ini menjadi inspirasi bagi kabinet Ali Sastroamidjojo 1 untuk menetapkan kebijakan Alibaba. Kebijakan Alibaba ditetapkan karena mayoritas sistem perekonomian yang ada di Indonesia pada masa itu adalah dikuasai oleh pengusaha asal Cina. Sehingga ditetapkan kebijakan Alibaba.

Orang pribumi yang mempunyai ijin usaha dikenal dengan istilah *Ali* sedangkan Cina yang menjalankan perusahaan disebut *Baba*. Kebijakan ini bertujuan untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional. Pada prakteknya setiap seorang *Baba* diwajibkan memberikan pengajaran kepada 2 orang pengusaha pribumi. Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional (Pujoalwanto, 2014).

Namun keadaan yang terjadi pada pelaksanaan *Ali-Baba* saat itu para pengusaha asing malah menguasai lisensi impor, mendapat kemudahan dalam kontrak dan pencairan kredit, dengan tidak melibatkan pengusaha pribumi di dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, umumnya yang menjalankan usaha tersebut adalah golongan Cina. Tentu saja hal ini merugikan pihak pribumi, karena yang mendapatkan keuntungan besar adalah orang Cina (Nalenan, 1982).

Kenyataan yang terjadi ternyata tidak sesuai yang di harapkan, keinginan untuk memajukan pengusaha pribumi, agar para pengusaha pribumi dan non pribumi bekerjasama untuk memajukan ekonomi nasional tidak berjalan dengan baik, bahkan perusahaan China semakin maju tanpa melibatkan masyarakat pribumi (Wijayanti, 2019).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis. Penelitian historis sendiri menurut Nugroho Notosusanto adalah “Sekumpulan prinsip atau aturan yang sistematis yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan secara efektif dalam usaha mengumpulkan bahan-bahan bagi sejarah, menilai secara kritis dan kemudian menyajikan suatu sintesa dari pada hasil-hasilnya dalam bentuk tertulis” (Notosusanto, 1984).

Selanjutnya Nograho Notosusanto membagi penelitian sejarah ke dalam empat langkah yaitu Heuristik, yaitu pengumpulan sumber-sumber data. Kritik, yaitu menyelidiki keaslian dan keabsahan sumber-sumber data yang di dapat. Interpretasi, yaitu merangkai berbagai sumber-sumber data yang telah di kritik menjadi satu kesatuan agar menerangkan objek penelitian. Historiografi, yaitu tahap penulisan hasil penelitian (Notosusanto, 1984).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Keadaan Perekonomian Indonesia Sebelum 1953-1955**

Ciri ekonomi Indonesia yang menonjol pada 1950 an bersifat dualistik yang menampilkan perpecahan cukup tajam antara sektor ekonomi modern dan pertanian tradisional yang subsisten. Sektor modern yakni industri mayoritas

dikuasai oleh perusahaan Belanda. Kolonialisme juga menumbuhkan kesadaran bahwa tanah yang dieksploitasi oleh penjajah dipergunakan untuk kesejahteraan kolonial (penjajah) dan bukan untuk tanah yang dijajah. Tumbuhnya kesadaran tersebut merupakan bagian dari rasa nasionalisme berbangsa. Saat nasionalisme menemukan bentuknya dalam negara bangsa, republik pascaproklamasi kemerdekaan 1945 ternyata tidak mudah melepaskan diri dari cengkeraman kepentingan ekonomi Barat. Proses nasionalisasi ini dimulai saat usainya Konferensi Meja Bundar pada 1949 yang menghasilkan salah satu kesepakatan adanya nasionalisasi terhadap perusahaan milik negara, termasuk perusahaan kereta api negara Belanda (*Staatspoor*), di samping kesepakatan lain seperti penyerahan Irian Barat setahun kemudian serta diizinkan orang-orang Belanda untuk berbisnis kembali di Indonesia. Kemudian mencapai puncaknya pada tahun 1958 bersamaan dengan munculnya UU No. 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan Milik Belanda. Kebijakan ini menjadi cikal bakal perusahaan negara yang kini dikenal sebagai Badan Usaha Milik Negara (Wardodjo, 2018).

### **Hubungan Luar Negeri Indonesia dan Cina**

Hubungan yang terbangun dengan Tiongkok ditandai dalam siklus pasang surut. Pada Januari 1950, Mohammad Hatta, yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mengungkapkan niat pemerintahannya untuk membuka hubungan diplomatik dengan Tiongkok. Ia mengusulkan bahwa Beijing harus lebih dahulu mengakui Jakarta karena RRT didirikan sebelum

Republik Indonesia. Pada 26 Januari, Mao Tse Tung mengirim telegram kepada Liu Shaoqi. Liu diminta untuk membuka hubungan diplomatik. Pada Mei 1950, Zhou Enlai, Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, sepakat untuk mengirim Wang Renshu sebagai Duta Besar pertama ke Jakarta (Liu, 2015). Dalam praktiknya duta besar Cina akan menekan orang-orang Cina untuk bekerja sama dengan pribumi, tapi keadaannya tidak demikian. Sedangkan pada saat itu Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi.

Tetapi hal tersebut tidak bersambut baik ketika pemerintahan Hatta digantikan oleh kabinet Natsir yang anti-komunis. Kesempatan yang menguntungkan bagi Beijing untuk memperbaiki hubungan dengan Jakarta mulai muncul setelah Juni 1953, menyusul terbentuknya sebuah kabinet baru yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Tidak seperti pemerintah Indonesia sebelumnya, kabinet Ali sebenarnya bergantung pada dukungan parlemen, dukungan mayoritas dari Partai Komunis Indonesia (PKI). PKI dapat memainkan peran kunci ini karena pemerintahan Ali didasarkan pada koalisi lemah yang dipimpin oleh sayap kiri PNI. Supaya dapat memegang mayoritas yang bekerja tetapi mengecualikan partai Islam konservatif, membutuhkan dukungan parlemen dari ekstrem kiri dan hal tersebut hanya dapat diberikan oleh PKI (Mozingo, 1976).

Langkah pertama yang diambil kabinet Ali untuk memperbaiki hubungan dengan China adalah mengirimkan seorang anggota elit Indonesia yang terkenal, Arnold Mononutu, sebagai duta besar pertama ke Peking pada Oktober 1953. Hubungan ekonomi selanjutnya

dieksplorasi dan pada bulan Desember 1953 sebuah perjanjian perdagangan dua tahun Sino-Indonesia ditandatangani. Peking menanggapi perkembangan yang menggembirakan ini pada bulan November 1954 dengan mengirim, sebagai duta besar barunya ke Jakarta, Huang Chen, seorang perwira diplomat senior yang sebelumnya diposkan di Eropa Timur. Pada akhir 1954 hubungan diplomatik penuh telah tercapai. Saatnya sudah matang untuk dua kekuatan untuk mempertimbangkan masalah politik substantif yang sebelumnya tidak dapat mereka bahas, apalagi bernegosiasi (Mozingo, 1976).

Negara Indonesia dan Cina memiliki kesamaan cita-cita yaitu menghapus penindasan dan menciptakan keadilan sosial. Bangsa Tiongkok dan bangsa Indonesia memiliki banyak kesamaan. Cita-cita Cina adalah membangun dunia baru yang bebas dari eksploitasi, penderitaan, dan penindasan dunia dengan kehidupan rakyat yang bebas dan bahagia. Seperti itu pulalah cita-cita bangsa Indonesia. Hal ini diucapkan Sukarno pada saat kunjungannya ke Tiongkok.

Kedekatan hubungan antara Cina dan Indonesia yang mulai terbangun sejak tahun 1950. Hal ini diperkuat dengan pengiriman duta besar Indonesia ke Peking pertama kali pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo 1 yaitu Arnold Mononutu. Lalu pengiriman duta besar dari Cina ke Jakarta pertama kali yaitu Wang Renshu. Kedekatan hubungan antara kedua negara inilah yang mempermudah proses duplikasi kebijakan Cina yaitu Kebijakan Repelita 1 kepada Kebijakan Alibaba di Indonesia.

Hubungan ekonomi selanjutnya dieksplorasi dan pada

bulan Desember 1953 sebuah perjanjian perdagangan dua tahun Sino-Indonesia ditandatangani. Peking menanggapi perkembangan yang menggembirakan ini pada bulan November 1954 dengan mengirim, sebagai duta besar barunya ke Jakarta, Huang Chen, seorang perwira diplomat senior yang sebelumnya diposkan di Eropa Timur (Mozingo, 1976).

Cina membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, dan manufaktur baja. Cina lebih memfokuskan kebijakan Repelita 1 di bidang industri karena dinilai industri Cina pada masa itu dikuasai oleh asing (Oktasari, 2016).

Hal ini juga terjadi di Indonesia dimana industri di Indonesia didominasi oleh pengusaha non-pribumi (Cina). Bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa. Caranya ialah, memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi melalui bantuan kredit. Upaya ini diharapkan menciptakan kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik (Muhaimin, 1990).

Kebijakan Repelita 1 yang berlaku di Cina memilih mengikuti model pembangunan ekonomi Soviet, yang menekankan industrialisasi yang pesat melalui investasi di industri berat. Tidak mengherankan, Rencana Lima Tahun pertama menampilkan model ekonomi gaya komando Soviet yang dicirikan oleh kepemilikan negara, kolektif pertanian, dan perencanaan ekonomi terpusat.

Pemerintah Cina perlu menasionalisasi industri agar mereka dapat

memusatkan modal dalam proyek-proyek industri berat. Untuk memperoleh modal, pemerintah China menasionalisasi sistem perbankan dan menerapkan kebijakan pajak dan kredit yang diskriminatif, menekan pemilik bisnis swasta untuk menjual perusahaan mereka atau mengubahnya menjadi urusan publik-swasta bersama (Oktasari, 2016).

Hal ini juga dilakukan di Indonesia. Pemerintah Indonesia menasionalisasikan sistem perekonomian dengan peralihan aset ekonomi yaitu peralihan kelembagaan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RI dan nasionalisasi. Seperti nasionalisasi DJB dan memberikan pinjaman kepada pengusaha-pengusaha pribumi agar perekonomian tidak dikuasai oleh pengusaha Cina. Pemerintah mewajibkan setiap 1 orang pengusaha Cina harus memberikan pengajaran kepada pengusaha pribumi. Pemerintah memberikan kredit lisensi bagi para pengusaha pribumi untuk menasionalisasikan sistem perekonomian Indonesia masa itu.

Pada pelaksanaan kebijakan Repelita 1 di Cina yang meniru dari gaya Soviet dalam hal ini Uni Soviet mendanai banyak proyek industri berat China, bantuan Soviet datang dalam bentuk pinjaman yang, tentu saja, harus dibayar kembali oleh China (Oktasari, 2016). Namun pada pelaksanaannya di Indonesia pada masa itu Indonesia berjuang sendiri di tengah perekonomian Indonesia yang kurang baik karena peralihan dari sistem perekonomian kolonial menuju nasional.

Mayoritas penduduk yang petani dan sektor industri dikuasai non-pribumi juga menjadi faktor perekonomian Indonesia kurang baik dan hasil akhirnya yaitu kebijakan

Alibaba di Indonesia mengalami kegagalan berbeda dengan kebijakan Repelita 1 yang mengalami keberhasilan.

Untuk memperoleh modal, pemerintah China menasionalisasi sistem perbankan dan menerapkan kebijakan pajak dan kredit yang diskriminatif, menekan pemilik bisnis swasta untuk menjual perusahaan mereka atau mengubahnya menjadi urusan publik-swasta bersama (Oktasari, 2016).

Hal ini juga dilakukan di Indonesia untuk mengimplementasikan kebijakan Alibaba. Kebijakan ekonomi Alibaba menekankan Indonesianisasi perekonomian dan memberi dorongan kepada para pengusaha pribumi, karena pada saat itu perekonomian khususnya dibidang industri mayoritas dikuasai oleh pengusaha asing. Kebijakan ini juga mewajibkan 1 orang pengusaha asing memberikan pengajaran kepada 2 orang pengusaha pribumi (Riawan, 2016).

Pemerintah China berupaya memodernisasi metode pertanian negara itu. Pada kebijakan Repelita 1 tahun 1950 ditetapkan kebijakan Sentralisasi Pajak yaitu pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai pajak industri serta komersial wajib diserahkan kepada pemerintah pusat (Oktasari, 2016). Hal ini tidak dilakukan di Indonesia, Menteri Iskaq mengeluarkan sebuah surat edaran yang menyatakan bahwa bagi para importir nasional disediakan 80-90% dari lisensi devisa. Program ini diwujudkan dengan adanya hak-hak istimewa lainnya yang diberikan kepada importir Indonesia dalam bentuk alokasi lisensi devisa (Muhaimin, 1990).

### **Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana Lima Tahun Pertama Cina dan Kebijakan Ekonomi Alibaba pada Sektor Pertanian.**

Politik hukum pertanian di era orde lama dan orde baru menyisakan beban yang besar bagi pemerintah di era reformasi. Hal ini mengingat banyak persoalan di bidang pertanian yang merupakan peninggalan dari kebijakan pertanian di kedua era tersebut. Di era orde lama, fokus utama politik hukum pertanian diarahkan kepada upaya-upaya untuk Nasionalisasi perkebunan Belanda, Meningkatkan produksi pangan dengan jalan membentuk program dan mengintensifkan program penyuluhan melalui Balai Pendidikan Masyarakat Desa (BPMD) dan Penyelesaian sengketa lahan pertanian yang kemudian diprogramkan menjadi landreform.

Pemerintah di era orde lama lanjutan merumuskan program Berdiri di Atas Kaki Sendiri (BERDIKARI) yang direalisasikan melalui program pemerataan kemakmuran rakyat dengan landreform yang diinisiasi melalui penerbitan Undang-Undang tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) beserta peraturan pelaksanaannya dan Melaksanakan program Rencana Kemakmuran Istimewa (RKI) yang ditujukan untuk mengembangkan sektor pertanian dengan cara mengembangkan cara-cara baru dalam teknik usaha tani, membangun kelembagaan penunjang sarana produksi, dan lainnya. Sayangnya, program tersebut tidak berjalan efektif (Wiradi, 2005)

Pada Kebijakan Ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina Pemerintah mendorong petani untuk mengumpulkan pertanian mereka untuk mengontrol harga dan distribusi

barang pertanian. Walau akibatnya mereka mampu menjaga harga pangan tetap rendah bagi pekerja perkotaan, perubahan tersebut tidak meningkatkan produksi biji-bijian secara signifikan.

Pada tahun 1950 ditetapkan kebijakan Sentralisasi Pajak yaitu pajak pertanian, pajak komoditi, dan berbagai pajak industri serta komersial wajib diserahkan kepada pemerintah pusat. Pada sektor pertanian maupun industri mengalami kenaikan. Pendapatan Nasional Kotor (GNP) dan Produksi modern di Cina juga mengalami peningkatan yang besar (Oktasari, 2016).

### **Persamaan Kebijakan Ekonomi Rencana Lima Tahun Pertama Cina dan Kebijakan Ekonomi Alibaba pada Sektor Perindustrian**

Kabinet Ali Sastroamidjojo juga bergerak dalam perindustrian, yaitu memajukan pendirian industri nasional yang bertujuan agar secepat mungkin Republik Indonesia dapat menjamin kebutuhan sendiri dan dapat melindungi industry nasional dari persaingan asing. Selain itu, pembangunan industry dikarenakan struktur ekonomi Indonesia masih berdasarkan agrarian. Oleh karena itu perekonomian Indonesia harus dimajukan dengan sedemikian rupa, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat untuk Indonesia memproduksi sendiri, memajukan industry ini sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan ekonomi.

Untuk memenuhi program kerja tentang perkembangan industri, pemerintah mendirikan beberapa perusahaan besar, diantaranya membuka pabrik soda dan chlor di Waru, membuka pabrik semen di Gresik pada mei, membuka pabrik pemintalan di Cilacap, membuka

pabrik pemintalan di Semarang, dan juga membuka pabrik pemintalan di Pematang Siantar Medan. Dengan adanya industri-industri besar tersebut, mengharapkan kebutuhan primer bangsa Indonesia tidak lagi tergantung dari luar negeri. Dalam hal ini pakaian adalah yang terpenting, sehingga pembangunan industri tekstil mendapat perhatian yang khusus, baik dalam hal pemintalan maupun pertenenan, finishing atau tricotage.

Dalam usaha pembangunan ekonomi serta mengurangi ketergantungan Indonesia pada luar negeri dalam hal kebutuhan barang-barang pokok, pembangunan pabrik rabuk, sebagian besar kehidupan masyarakat Indonesia mempunyai tempat yang utama dalam rangkaian kerja pemerintah. Dalam hal ini pemerintah terus berusaha kearah pembangunan dan berusaha membantu kegiatan-kegiatan masyarakat yang berusaha memajukan ekonomi. Diantara rencana pemerintah yang telah mempunyai bentuk nyata adalah penyempurnaan dan melengkapi pabrik fosfat dengan produksi kurang lebih sebesar 5.000 ton setahun dengan target produksi 30.000 tahun tiap tahunnya, pembangunan pabrik urea di Sumatera Selatan dengan target produksi 100.000 ton tiap tahun.

Untuk melindungi industri dalam negeri terhadap persaingan barang impor, pemerintah Republik Indonesia mengadakan pemungutan Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) yang lebih tinggi untuk barang-barang. Hal ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) untuk bahan-bahannya, atau hanya diimpor jika completely knocked down. Untuk mengurangi kesukaran perusahaan-perusahaan industri dan pembayaran uang muka, pemerintah Indonesia

melakukan penundaan pembayaran Tambahan Pembayaran Impor (T.P.I) sampai adanya dokumenten. Selain dalam bidang Perindustrian, pertambangan juga menjadi sektor tersendiri, yang juga memberikan peran dalam menambah produksi dalam negeri. Dalam urusan pertambangan produksi yang terpenting adalah minyak, yang didirikan oleh perusahaan-perusahaan minyak asing, seperti NV, BPM, SVPM CPPM, dan juga perusahaan campuran antara pemerintah dan BPM seperti, NV, NIAM (Arta, 2020).

Pada kebijakan ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, dan manufaktur baja. Mengalihkan fokus ekonomi negara dari pertanian dan beralih ke teknologi (seperti konstruksi mesin). pemerintah China memilih mengikuti model pembangunan ekonomi Soviet, yang menekankan industrialisasi yang pesat melalui investasi di industri berat. Pemerintah Cina perlu menasionalisasi industri agar mereka dapat memusatkan modal dalam proyek-proyek industri berat. Banyak pabrik dan fasilitas gedung dibuka, meningkatkan produksi industri 19% setiap tahun antara tahun 1952 dan 1957. Rencana Lima Tahun telah diimplementasikan secara terus menerus di Cina. Rencana Lima Tahun Pertama China (1953-57) memiliki strategi dua cabang. Tujuan pertama adalah membidik tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan menitikberatkan pada pengembangan industri berat, termasuk aset-aset seperti pertambangan, manufaktur besi, dan

manufaktur baja. Tujuan kedua adalah mengalihkan fokus ekonomi negara dari pertanian dan beralih ke teknologi (seperti konstruksi mesin). Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah China memilih mengikuti model pembangunan ekonomi Soviet, yang menekankan industrialisasi yang pesat melalui investasi di industri berat (Darini, 2010).

### KESIMPULAN

Berdasarkan data-data yang telah diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Ekonomi Rencana 5 Tahun Pertama Cina memiliki persamaan dengan Kebijakan Ekonomi Ali-baba. Dalam penelitian ini beberapa sektor ekonomi yang diteliti antara yaitu pertanian dan perindustrian pada kebijakan Rencana 5 Tahun Pertama Cina dan Kebijakan Alibaba.

Kebijakan di Indonesia dan Cina memiliki banyak kesamaan di antaranya kesamaan pada cita-cita yaitu menghapus penindasan dan mewujudkan keadilan sosial. Selain itu Cina memiliki ide pemerintahan dengan mobilisasi rakyat Tiongkok yang membawa pada kemajuan ekonominya. Sistem perekonomian yang mayoritas pertanian klasik dan industri sederhana di Cina juga merupakan kesamaan dengan sistem perekonomian Indonesia masa itu. Terlebih lagi negara Indonesia memiliki kedekatan hubungan luar negeri dengan Cina.

### DAFTAR PUSTAKA

Arta, K. S. (2020). Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal dan Tercapainya Pemilihan Umum I Pada Tahun 1955 di Indonesia. *Jurnal Widya Citra*, 1(2), 69-85

<https://doi.org/10.10101/juwitra.v1i2.169>

- Darini, R., & HUM, M. (2010). *Garis besar Sejarah China Era Mao. Skripsi, Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta.*
- Hatta, M. (2008). *Demokrasi Kita: dan Pikiran-pikiran Tentang Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat.* Bandung. Segarsy.
- Hidayat, A., & Hidayat, F. (2020). *Dinamika Nasional De Javasche Bank: Sebuah Perjuangan Menjadi Bank Indonesia (1950-1953)* [10.31227/osf.io/8ych7](https://doi.org/10.31227/osf.io/8ych7)
- Indonesia, B. (2005). *Sejarah Bank Indonesia periode II: 1959-1966, Bank Indonesia pada masa ekonomi terpimpin.* Jakarta. *Bank Indonesia.*
- Liu, H. (2015). *Sukarno, Tiongkok dan Pembentukan Indonesia 1949-1965.* Jakarta. *Komunitas Bambu.*
- Mozingo, D. (2007). *Chinese policy toward Indonesia, 1949-1967.* Equinox Publishing.
- Muhaimin, Y. (1990). *Bisnis dan politik: kebijaksanaan ekonomi Indonesia 1950-1980.* LP3ES.
- Nalena, R. (1982). *Iskaq Tjokrohadi-surjo, Alumni Desa Bersemangat Banteng.* Jakarta. Gunung Agung. Hal 138.
- Notosusanto, N. (1984). *Masalah Penelitian Sejarah Kontemporer,* Jakarta. Idayu Pres.
- Oktasari, W. (2016). *Peran Mao Zedong dalam Perekonomian Cina Tahun 1949-1960.* Prodi. *Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta* <http://repository.upy.ac.id/id/eprint/1178>
- Pujoalwanto, B. (2014). *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis.*

- Teoritis dan Empiris. Yogyakarta: Graha Ilmu*
- Riawan, Y. H. U. (2016). Kebijakan Politik RI Masa Demokrasi Liberal 1950-1959
- Sakirman, S. (1954). Djalan Keluar dari Krisis Ekonomi. Jakarta. Jajasan Pembaruan.
- Setiawan, J., Permatasari, W. I., & Kumalasari, D. (2018). Sistem Ketatanegaraan Indonesia pada Masa Demokrasi Liberal Tahun 1950-1959. *Historia: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 6(2), 365-378  
<http://dx.doi.org/10.24127/hj.v6i2.1250>
- Sudirman, A. (2014). Sejarah Lengkap Indonesia. Yogyakarta. Diva Press.
- Wardodjo, W. W. (2019). Ekonomi Indonesia Tahun 1950-an dan Penguasaan Negara terhadap Perusahaan Kereta Api Pasca KMB 1949. *Indonesian Historical Studies*, 2(2), 96-106  
<https://doi.org/10.14710/ihis.v2i2.3862>
- Wijayanti, Y. (2019). Kebijakan Pemerintah Indonesia Masa Orde Lama Dibidang Ekonomi Terhadap Bisnis Orang Cina. *Jurnal Artefak*, 3(2), 113-118  
<http://dx.doi.org/10.25157/ja.v3i2.1094>
- Wiradi, G. (2005). Politik Pertanian/Agraria di Indonesia Dari Masa Ke Masa, hlm. 8 diakses melalui:  
<http://kpa.or.id/publikasi/download/a86da-gwr-2005-politik-agraria-di-indonesia-dari-masa-ke-masa.pdf>